

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam usaha memajukan pembangunan bangsa karena terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Suroto dalam Tindaon (2010), tenaga kerja merupakan motor penggerak dalam pembangunan, yang berperan sebagai sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan distribusi barang/jasa, serta sebagai sasaran untuk menghidupkan dan mengembangkan pasar. Oleh sebab itu, ketenagakerjaan dijadikan salah satu prioritas utama pembangunan oleh pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2010-2014.

Permasalahan yang akan selalu dihadapi sektor ketenagakerjaan nasional adalah tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan dampak dari jumlah angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat dari pada kesempatan kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 diketahui bahwa angka pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2008 mencapai 9.394.515 jiwa, 2009 jumlahnya 8.962.617 jiwa, 2010 sebanyak 8.319.779 jiwa, 2011 dan 2012 adalah 7.700.086 jiwa dan 7.244.956 jiwa. Walaupun angka pengangguran 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan, namun penurunan tersebut tidak cukup signifikan. Karena hingga tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia masih berkisar pada 6,32%. Angka tersebut masih belum sesuai dengan

target pemerintah dalam RPJMN 2010–2014 yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5% hingga 6%.

Persoalan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat nasional tetapi juga pemerintah di tingkat daerah. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di daerah mereka masing-masing. Namun kenyataannya, masih banyak provinsi yang memiliki angka pengangguran yang tinggi bahkan melebihi angka pengangguran nasional, salah satunya adalah Provinsi Sumatera Barat. Menurut data BPS, dari 4.957.719 jiwa jumlah penduduk Sumatera Barat tahun 2012, 2.179.826 jiwa adalah angkatan kerja yang terdiri dari 2.037.642 jiwa penduduk bekerja dan 142.184 jiwa pengangguran terbuka, dengan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,52%.

Padahal pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang dicerminkan oleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Barat hampir setiap tahun mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2011, pertumbuhan PDRB Provinsi Sumatera Barat berdasarkan harga konstan tahun 2000 adalah 6,25% dan meningkat menjadi 6,35% pada tahun 2012. Dengan membandingkan data nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat dengan data tingkat pengangguran terbuka, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat belum mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia secara maksimal. Kondisi ideal dari pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan tenaga kerja adalah ketika pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja secara lebih besar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 1996 tiap 1% pertumbuhan

ekonomi mampu menyerap tenaga kerja baru sekitar 400.000 – 500.000, namun mulai tahun 2000 hanya mampu menyerap sekitar 200.000 – 300.000 tenaga kerja baru bahkan mungkin kurang dari angka itu.

Kondisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat pada tahun 2012 dari sisi penawaran jumlah angkatan kerja mencapai 2.179.826 orang dari jumlah penduduk usia kerja. Penawaran tenaga kerja tersebut dipengaruhi oleh faktor demografi, sosial dan ekonomi. Salah satu demografi yang mempengaruhi jumlah penawaran tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia kerja semakin besar pula penawaran tenaga kerja. Selama rentang tahun 2008 sampai 2012 pertumbuhan penduduk usia kerja rata-rata pertahunnya relatif rendah yaitu sekitar 1%. Pada tahun 2012 jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Barat tercatat sebanyak 3.380.892 orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 64,47%. TPAK ini berkaitan dengan faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan yang tersedia, kesetaraan gender dan lain-lain.

Dari sisi permintaan tenaga kerja di Sumatera Barat, sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2012 sektor ini menyerap 40,60% tenaga kerja, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, restoran yang menyerap tenaga kerja sebesar 24,27 % dan kemudian sektor jasa yang menyerap 18,32% tenaga kerja. Upaya menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah yang besar telah dilakukan melalui pengembangan industri, baik tahap pemulihan ekonomi maupun upaya pengembangan industri-industri baru dan perluasan.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, beberapa sektor yang memberikan kontribusi cukup besar pada PDRB Sumatera Barat tahun 2012 adalah sektor pertanian sebesar 22,47%, perdagangan perhotelan & restoran (pariwisata) sebesar 18,16% dan sektor jasa sebesar 17,25%.

Sektor jasa semakin memegang peranan penting dalam perekonomian, karena sektor ini merupakan sektor penunjang dalam membantu peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Peran sektor jasa berkembang dengan pesat beberapa tahun terakhir dan termasuk 3 besar sektor yang menyerap tenaga kerja cukup besar. Menurut data BPS Sumatera Barat, selama tahun 2012 sektor jasa di Sumatera Barat mampu menyerap 325.927 orang tenaga kerja.

Peningkatan sektor jasa disebabkan adanya peningkatan kompleksibilitas kebutuhan masyarakat sehingga konsumsi akan barang-barang, selain kebutuhan primer semakin beragam dan meningkat. Begitu juga dengan kebutuhan untuk mengkonsumsi produk-produk jasa yang timbul dari kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan (Lupiyadi, 2006). Masyarakat semakin membutuhkan layanan-layanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan dan kepuasan. Misalnya saja dalam berurusan dengan administrasi pemerintahan, masyarakat sebagai pelanggan/konsumen pemerintah menginginkan sistem yang cepat dan mudah dalam menyelesaikan urusan-urusannya. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sektor jasa ini, sudah tentu dapat menyerap atau menampung tenaga kerja yang cukup banyak dan untuk pelayanan yang maksimal, tentu saja dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas.

1.2. Perumusan Masalah

Sektor jasa-jasa memainkan peranan yang cukup penting dalam perekonomian di Sumatera Barat, disamping sektor pertanian dan industri. Hal ini terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor jasa-jasa ini dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya. Namun, peningkatan ini belum diikuti oleh peningkatan yang positif dalam penyerapan tenaga kerja. Fakta memperlihatkan bahwa kontribusi sektor jasa-jasa ini dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2011 adalah sebesar 16,79% dan terjadi penurunan sebesar 0,79% pada tahun 2012 menjadi 16%. Sedangkan kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 kontribusi sektor jasa adalah sebesar 17% dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 17,25%.

Fenomena ini menarik untuk diteliti, karena pada dasarnya kenaikan kontribusi sektor dalam pembentukan PDRB akan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor tersebut. Artinya, setiap kenaikan kontribusi sektor jasa-jasa dalam pembentukan PDRB Sumatera Barat juga akan diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Sumatera Barat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat?

3. Bagaimana proyeksi penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat.
3. Memproyeksikan penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori, peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam memahami dan mengatasi permasalahan yang terkait dengan ekonomi ketenagakerjaan.
2. Manfaat metodologi, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tinjauan literatur bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang juga tertarik untuk mengkaji permasalahan ketenagakerjaan
3. Manfaat kebijakan, peneliti berharap penelitian dapat memberikan kontribusi dalam proses pembuatan kebijakan ketenagakerjaan. Sehingga

kebijakan tersebut tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan-persoalan ketenagakerjaan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Permasalahan ketenagakerjaan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Penelitian ini menganalisis perkembangan penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 1993 sampai tahun 2012. Penelitian ini mengkaji penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa dari sisi permintaan tenaga kerja untuk menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Analisis dibatasi pada beberapa variabel yang diduga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sektor jasa-jasa, yaitu jumlah angkatan kerja terdidik, investasi sektor jasa-jasa, produk domestik regional bruto (PDRB) sektor jasa-jasa, dan upah rata-rata sektor jasa-jasa.

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 7 bab, yaitu :

Bab I : Adalah bab pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Adalah bab tinjauan pustaka, mengemukakan pendapat dan pernyataan para ahli dari berbagai literatur yang menjadi landasan penelitian, hasil penelitian terdahulu dan informasi-informasi yang

- mendukung penelitian.
- Bab III : Adalah bab metodologi penelitian, berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data serta definisi operasional variabel yang diuji.
- Bab IV : Adalah bab gambaran umum lokasi penelitian, memuat deskripsi gambaran umum objek penelitian dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman yang terkait dengan penelitian.
- Bab V : Adalah bab hasil dan pembahasan, berisikan temuan-temuan penelitian dan pembahasan mengenai hasil analisis data yang diperoleh serta implikasinya terhadap perencanaan kebijakan.
- Bab VI : Adalah bab Implikasi kebijakan, mencakup kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini
- Bab VII : Adalah bab kesimpulan dan saran, mencakup kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran atas analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.